



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**



PERJANJIAN KINERJA

**PEMUTAKHIRAN II
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YASONNA H. LAOLY
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

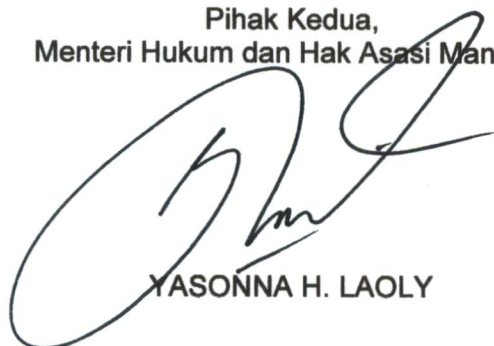
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



YASONNA H. LAOLY

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal



RAZILU

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR JENDERAL DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SSKL-08: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	80,0

Sasaran Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-05: Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	IKP-01: 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-06: Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKP-01: 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
SP-07: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	IKP-01: 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	IKP-02: 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	IKP-03: 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK-1 dan SK-2: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui <i>pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR)</i> untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	76 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	66 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	86 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	84 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437
2.	SK-3 dan SK-4: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui <i>pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR)</i> untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	56 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	83 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	86 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	70 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	75 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	4 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437
3.	SK-5 dan SK-6: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui <i>pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR)</i> untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	56 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	73 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	86 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	73 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437
4.	SK-7 dan SK-8: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui <i>pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR)</i> untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	56 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	9 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	86 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	75 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437
5.	SK-9 dan SK-10: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui <i>pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR)</i> untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	35 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	32 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	94 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	64 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	20 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437

6.	SK-11 dan SK-12: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui <i>pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR)</i> untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	25 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	82 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	86 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	92 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437
7	SK-13: Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	1. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	1 Rekomendasi
		2. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0
8.	SK-14: Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1. Indeks RB ITJEN	34,92
		2. Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	82,89
9.	SK-15: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	1. Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	85 %
		2. Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	4

10.	SK-16: Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	84 %
11.	SK-17: Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel	1. Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	87 %
		2. Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	12 bulan layanan
12.	SK-18: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	1. Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP
		2. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	88 %
		3. Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	96 %

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

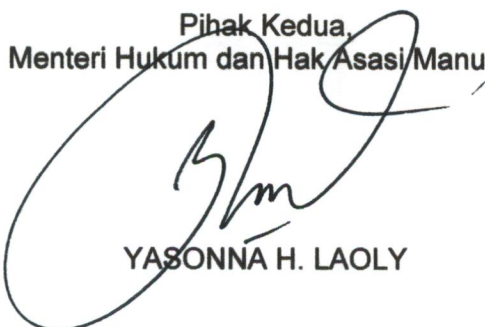
No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 76.877.008.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp. 5.599.719.000,-
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp. 5.599.719.000,-
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp. 5.599.719.000,-
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp. 5.599.719.000,-
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp. 5.599.719.000,-
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp. 10.107.977.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 38.770.436.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir Automatic Adjustment sebesar Rp. 19.240.569.000,-

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



YASONNA H. LAOLY

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal



RAZILU



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 September 2022

Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. NATANEGARA K.P.
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Sekretaris Inspektorat Jenderal

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

R. NATANEGARA K.P.
NIP 19730908 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL DENGAN INSPEKTUR JENDERAL

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
SP-07 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
SK-13	Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham	1. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) untuk Meningkatkan Integritas Kementerian Hukum dan HAM 2. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	satu Rekomendasi 80,0

SK-14	Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1. Indeks RB ITJEN	34,92
		2. Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	82,89
SK-15	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	1. Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	85 %
		2. Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	4
SK-16	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	84 %
SK-17	Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel	1. Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	87 %
		2. Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarana Prasarana Internal	12 bulan layanan
SK-18	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	1. Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP
		2. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	88 %
		3. Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	96 %

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

No.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp.38.770.436.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-13) Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Rp. 639.622.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-14) Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Rp. 3.711.389.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-15) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	Rp. 1.470.818.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-16) Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	Rp. 789.328.000,-

Sasaran Kegiatan (SK-17) Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel	Rp. 31.601.886.000,-
Sasaran Kegiatan (SK-18) Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	Rp. 557.393.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* sebesar
Rp. 7.847.051.000,-

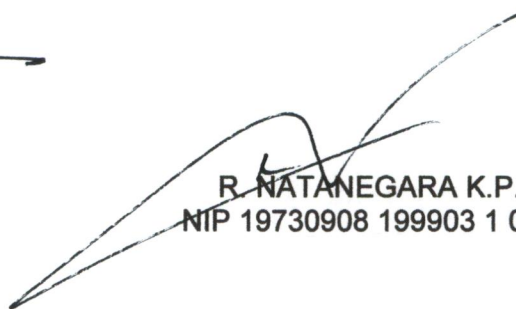
Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Sekretaris Inspektorat Jenderal



RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002



R. NATANEGARA K.P.
NIP 19730908 199903 1 001



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ICON SIREGAR
Jabatan : Inspektur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah I

ICON SIREGAR
NIP 19630417 198303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH I DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 (Terdefinisi)
SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SK-1 dan SK-2: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui <i>pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR)</i> untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham 2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I 3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	3 (integrated) 76 % 66%

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	86 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	84 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

No.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Anggaran
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp.5.599.719.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-1 dan SK-2) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Rp. 5.599.719.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS: DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 1.552.327.000,-

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah I



ICON SIREGAR
NIP 19630417 198303 1 001



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD RIFAI
Jabatan : Inspektur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah II

AHMAD RIFAI
NIP 19621213 198603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH II DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 (Terdefinisi)
SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK-3 dan SK-4: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	56 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	83 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	86 %

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	70 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	75 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	4 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

No.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Anggaran
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp.5.599.719.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-3 dan SK-4) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Rp. 5.599.719.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 1.312.804.000,-

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah II



AHMAD RIFAI
NIP 19621213 198603 1 001



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IWAN SANTOSO
Jabatan : Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah III

IWAN SANTOSO
NIP 19700430 199103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH III DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 (Terdefinisi)
SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK-5 dan SK-6 Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	56 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	73 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	86 %

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	73 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

No.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Anggaran
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp.5.599.719.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-5 dan SK-6) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Rp.5.599.719.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 1.174.171.000,-

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah III



IWAN SANTOSO
NIP 19700430 199103 1 001



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI
Jabatan : Inspektur Wilayah IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah IV

BUDI
NIP 19621125 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH IV DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 (Terdefinisi)
SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK-7 dan SK-8: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	56 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	9 %

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	86 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	75 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

No.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Anggaran
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp.5.599.719.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-7 dan SK-8) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Rp.5.599.719.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* sebesar

Rp. 1.281.968.000,-

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah IV



BUDI
NIP 19621125 198903 1 002



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH V**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARASIDIN
Jabatan : Inspektur Wilayah V

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah V

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

MARASIDIN
NIP 19640425 199001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH V DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 (Terdefinisi)
SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK-9 dan SK-10: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	35 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	32 %

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	94 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	64 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	20 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

No.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Anggaran
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp.5.599.719.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-9 dan SK-10) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Rp.5.599.719.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 1.607.962.000,-

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah V



MARASIDIN
NIP 19640425 199001 1 001



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH VI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LULUK RATNANINGTYAS
Jabatan : Inspektur Wilayah VI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAZILU
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah VI

RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

LULUK RATNANINGTYAS
NIP 19631001 199103 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR WILAYAH VI DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

Sasaran Program (SP) Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
SP-05 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	IKP-01 1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
SP-06 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKP-01 2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 (Terdefinisi)
SP-07 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	IKP-01 3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	IKP-02 4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	IKP-03 5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	IKP-04 6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK-11 dan SK-12: Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham 2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI 3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	3 (integrated) 25 % 82 %

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	86 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	92 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	80 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8 %
		8. Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	4,437

Keterangan: Target Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Kerja TA.2022

No.	Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Anggaran
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp. 10.107.977.000,-
	Sasaran Kegiatan (SK-11 dan SK-12) : Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Rp. 10.107.977.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 4.464.287.000,-

Jakarta, 1 September 2022

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



RAZILU
NIP 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah VI



LULUK RATNANINGTYAS
NIP 19631001 199103 2 001